



Pengaruh Persepsi Korupsi Pejabat Publik terhadap Motivasi Peserta Didik untuk Menjadi Aktor Politik pada Siswa SMA di Kota Tangerang Selatan

Endang Dwiyanto¹, Elmi Hairani², Fikri Fadillah³, Yatti Rosmiati⁴

¹⁻³Program Studi PPKN, Universitas Pamulang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: endangdwi@gmail.com

Abstract. Massive exposure to corruption information through social media has the potential to shape the political orientation of the younger generation. This study aims to analyze the level of perception of public officials' corruption and its influence on students' motivation to become political actors among high school students in South Tangerang City. Using a quantitative method with a correlational design, this study involved 150 12th grade students selected through a purposive sampling technique. Data were collected through a Likert-scale questionnaire and analyzed using a simple linear regression test with JASP software. The results of the analysis indicate that the perception of public officials' corruption has a positive and significant effect on students' motivation to become political actors ($\beta = 0.396$; $t = 3.820$; $p = 0.000$). The coefficient of determination ($R^2 = 0.198$) indicates that the perception of corruption contributes 19.8% to the variation in students' motivation. This finding rejects the main hypothesis (H1) and supports the alternative hypothesis (H2), proving that high perceptions of corruption actually trigger students' reactive motivation to enter politics to improve the system, not because of apathy. In conclusion, the higher the perception of public officials' corruption, the higher the students' motivation to become political actors. Educational institutions are advised to improve their anti-corruption education curriculum to direct this critical motivation constructively.

Keywords: Anti-Corruption Education; Corruption Perception; Political Motivation; Public Officials; Social Media.

Abstrak. Paparan informasi korupsi yang masif melalui media sosial berpotensi membentuk orientasi politik generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat persepsi korupsi pejabat publik dan pengaruhnya terhadap motivasi peserta didik untuk menjadi aktor politik pada siswa SMA di Kota Tangerang Selatan. Menggunakan metode kuantitatif dengan desain korelasional, penelitian ini melibatkan 150 siswa kelas XII yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert dan dianalisis menggunakan uji regresi linier sederhana dengan perangkat lunak JASP. Hasil analisis menunjukkan bahwa persepsi korupsi pejabat publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi peserta didik untuk menjadi aktor politik ($\beta = 0,396$; $t = 3,820$; $p = 0,000$). Nilai koefisien determinasi ($R^2 = 0,198$) menunjukkan bahwa persepsi korupsi berkontribusi sebesar 19,8% terhadap variasi motivasi siswa. Temuan ini menolak hipotesis utama (H1) dan mendukung hipotesis alternatif (H2), membuktikan bahwa tingginya persepsi korupsi justru memicu motivasi reaktif siswa untuk masuk ke dunia politik demi memperbaiki sistem, bukan karena apatisisme. Kesimpulannya, semakin tinggi persepsi korupsi pejabat publik, semakin tinggi motivasi peserta didik untuk menjadi aktor politik. Lembaga pendidikan disarankan meningkatkan kurikulum pendidikan antikorupsi untuk mengarahkan motivasi kritis ini secara konstruktif.

Kata kunci: Edukasi Antikorupsi; Media Sosial; Motivasi Politik; Pejabat Publik; Persepsi Korupsi.

1. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan permasalahan struktural yang memberikan dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam dimensi politik, korupsi yang dilakukan pejabat publik tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, memperlemah legitimasi demokrasi, serta mendorong munculnya apatisisme politik di kalangan warga negara. Mizrahi dan Natan Krup (2025) menegaskan bahwa lemahnya demokrasi mendorong berkembangnya korupsi

institusional yang pada gilirannya mereduksi kepercayaan publik, sementara norma sosial yang memandang korupsi sebagai sesuatu yang lumrah justru memperlemah dampak negatif korupsi terhadap kepercayaan institusional. Kondisi ini semakin diperparah ketika paparan informasi korupsi yang masif melalui media sosial turut membentuk ketidakpercayaan generasi muda terhadap sistem politik (Damijan, 2023 dalam *Frontiers in Political Science*, 2025). Di Indonesia, data Transparency International (2025) mencatat skor Indeks Persepsi Korupsi sebesar 37 dari 100 pada tahun 2024 menempatkan Indonesia di peringkat ke-99 dari 180 negara dan masih berada di bawah Singapura (84), Malaysia (50), serta Timor Leste (43) di kawasan ASEAN. Selama periode 2020–2024, KPK menangani 2.730 perkara korupsi (KPK, 2024), sementara Indonesia Corruption Watch (2025) mencatat bahwa penindakan kasus korupsi pada 2024 merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir, dengan hanya 364 kasus yang disidik turun 54 persen dibanding tahun sebelumnya.

Beberapa penelitian dari Indonesia telah mengkaji isu yang berkaitan dengan tema ini dari berbagai sudut. Ekasari, Sukmana, Kristiano, dan Susilo (2024) menemukan meningkatnya sikap apatis di kalangan pemilih muda Indonesia, di mana praktik *money politic* yang dipandang generasi muda sebagai akar korupsi tidak lagi dianggap sebagai masalah serius. Muhtarom, Pratama, dan Erlangga (2022) menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia telah berkembang menjadi fenomena kultural dan struktural yang direproduksi antar generasi, sehingga berpotensi membentuk toleransi terhadap perilaku koruptif sejak usia dini. Pradita, Priageng, Sartika, dan Fatkhuri (2024) menegaskan bahwa eksposur kasus korupsi pejabat publik seperti korupsi Bansos Juliari Batubara menimbulkan krisis legitimasi dan melemahkan partisipasi publik, khususnya di kalangan generasi muda. Sementara itu, Tanuja dan Winduwati (2024) menunjukkan bahwa pemberitaan korupsi yang terus-menerus melalui media sosial membentuk persepsi negatif generasi muda terhadap politik dan menurunkan kepercayaan mereka terhadap institusi pemerintah. Adapun Hasan, Wijaya, Yansah, Setiawan, dan Yuda (2024) menyoroti bahwa korupsi dalam sektor pendidikan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat terbentuknya generasi yang berintegritas dan bermotivasi untuk berkontribusi dalam kehidupan publik. Secara keseluruhan, kelima penelitian tersebut memperlihatkan bahwa dampak korupsi terhadap orientasi politik generasi muda di Indonesia bersifat multidimensional, namun belum ada yang secara spesifik mengukur pengaruhnya terhadap motivasi peserta didik untuk menjadi aktor politik.

Penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya mengkaji dampak persepsi korupsi terhadap partisipasi politik dalam arti luas seperti voting, protes, dan *civic engagement* namun belum secara spesifik meneliti pengaruhnya terhadap motivasi peserta didik untuk *menjadi*

aktor politik, yakni individu yang secara aktif bercita-cita menduduki posisi atau menjalankan peran dalam sistem politik formal maupun nonformal. Mayoritas studi juga dilakukan pada populasi mahasiswa atau pemilih dewasa, sementara penelitian pada siswa SMA sebagai kelompok yang sedang mengalami sosialisasi politik awal fase di mana kepercayaan institusional masih terbuka untuk dibentuk masih sangat minim (Stals, 2026). Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada tiga aspek: (1) fokus pada motivasi untuk menjadi aktor politik, bukan sekadar partisipasi politik umum; (2) subjek penelitian adalah siswa SMA yang berada pada fase sosialisasi politik awal; dan (3) konteks lokal Kota Tangerang Selatan sebagai kota metropolitan penyangga ibu kota dengan tingkat paparan informasi dan kepadatan penduduk muda yang tinggi.

Fenomena korupsi pejabat publik yang terus-menerus terekspos melalui media massa dan media sosial berpotensi membentuk persepsi negatif generasi muda terhadap dunia politik. Transparansi International (2024) mencatat bahwa pemuda kini menjadi kelompok yang paling aktif menggerakkan protes antikorupsi secara global jumlah demonstrasi yang dipimpin pemuda meningkat lebih dari enam kali lipat antara 2006 dan 2020, dengan korupsi sebagai isu terbesar kedua di balik aksi tersebut (Ortiz et al., 2022 dalam Transparency International, 2024). Kondisi ini menggambarkan dualisme respons: di satu sisi korupsi mendorong apatisme dan penolakan terhadap politik, di sisi lain dapat memicu motivasi reaktif untuk masuk ke dunia politik demi membawa perubahan (Vela-Miranda et al., 2024). Berdasarkan hal ini, penelitian merumuskan pertanyaan utama: Apakah persepsi korupsi pejabat publik berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi peserta didik untuk menjadi aktor politik pada siswa SMA di Kota Tangerang Selatan? Hipotesis utama (H1) menyatakan bahwa persepsi korupsi pejabat publik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap motivasi tersebut; sementara hipotesis alternatif (H2) mempertimbangkan kemungkinan bahwa persepsi korupsi justru memicu motivasi reaktif untuk masuk ke dunia politik demi membawa perubahan.

Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis tingkat persepsi korupsi pejabat publik di kalangan siswa SMA di Kota Tangerang Selatan dan menguji pengaruh persepsi korupsi pejabat publik terhadap motivasi peserta didik untuk menjadi aktor politik pada siswa SMA di Kota Tangerang Selatan secara kuantitatif.

2. KAJIAN TEORITIS

Kepercayaan Institusional dan Persepsi Korupsi. Kepercayaan institusional merujuk pada keyakinan warga negara bahwa lembaga publik bertindak adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan umum. Mizrahi dan Natan Krup (2025) menegaskan bahwa lemahnya fondasi

demokrasi mendorong berkembangnya korupsi institusional yang pada gilirannya mereduksi kepercayaan publik, sementara norma sosial yang memandang korupsi sebagai hal lumrah justru memperlemah dampak negatif korupsi terhadap kepercayaan tersebut. Dalam konteks Indonesia, korupsi kerap dipandang melalui perspektif patologi sosial sistemik, yaitu bentuk disfungsi yang merusak nilai, norma, dan kepercayaan masyarakat terhadap struktur pemerintahan, terutama ketika praktik korup terjadi secara terorganisasi di dalam institusi formal. Muhtarom, Pratama, dan Erlangga (2022) memperkuat hal ini dengan menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi fenomena kultural-struktural yang direproduksi antargenerasi, sehingga berpotensi membentuk toleransi terhadap perilaku koruptif sejak usia dini—suatu kondisi yang relevan dikaji pada siswa SMA yang berada pada fase pembentukan kepercayaan institusional awal.

Motivasi peserta didik untuk menjadi aktor politik dapat dijelaskan melalui *Self-Determination Theory* (Deci & Ryan), yang membedakan motivasi intrinsik dan ekstrinsik berdasarkan tiga kebutuhan psikologis dasar: otonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Otonomi dimaknai sebagai kebutuhan dasar yang membuat individu merasa tindakannya berasal dari kehendak sendiri, bukan paksaan eksternal, sehingga mendorong munculnya motivasi intrinsik yang bermakna secara personal. Teori ini relevan dipadukan dengan konsep efikasi politik (*political efficacy*), yakni keyakinan individu akan kapasitasnya memahami dan memengaruhi proses politik; studi pada siswa SMA di Kabupaten Barru membuktikan bahwa modul pendidikan politik secara efektif meningkatkan efikasi politik sekaligus partisipasi politik siswa. Hasan, Wijaya, Yansah, Setiawan, dan Yuda (2024) turut menegaskan bahwa korupsi dalam sektor pendidikan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat terbentuknya generasi yang bermotivasi untuk berkontribusi dalam kehidupan public menunjukkan keterkaitan langsung antara persepsi korupsi dan motivasi politik generasi muda.

Sosialisasi politik adalah proses pembelajaran nilai, sikap, dan perilaku politik yang berlangsung sejak usia dini melalui agen-agen seperti keluarga, sekolah, kelompok sebaya, dan media. Siswa SMA berada pada fase sosialisasi politik awal, yaitu periode di mana kepercayaan institusional masih terbuka untuk dibentuk (Stals, 2026), sehingga eksposur terhadap isu korupsi pada fase ini berpotensi membentuk orientasi politik jangka panjang. Keluarga berperan sebagai mikrosistem sosialisasi politik pertama yang membentuk sikap dan orientasi politik awal individu sebelum berinteraksi dengan agen sosialisasi lain, sementara di era digital, paparan informasi korupsi yang masif melalui media sosial turut membentuk persepsi dan ketidakpercayaan generasi muda terhadap sistem politik (Damijan, 2023 dalam *Frontiers in*

Political Science, 2025). Kondisi ini melahirkan dualisme respons sosialisasi sebagaimana dikemukakan Vela-Miranda dkk. (2024): di satu sisi persepsi korupsi dapat memicu apatisme politik, namun di sisi lain dapat memunculkan motivasi reaktif untuk masuk ke dunia politik demi membawa perubahan—dualisme inilah yang menjadi landasan teoretis utama untuk menguji pengaruh persepsi korupsi pejabat publik terhadap motivasi siswa SMA di Kota Tangerang Selatan untuk menjadi aktor politik.

3. METODE PENELITIAN

penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif yang ditandai dengan desain korelasional, yang secara khusus ditujukan untuk menyelidiki dampak persepsi pejabat publik mengenai prevalensi korupsi terhadap aspirasi dan motivasi peserta didik, terutama mereka yang terdaftar di sekolah menengah umum, untuk terlibat sebagai aktor politik, dengan demografis yang dipilih untuk penelitian ini adalah siswa kelas XII dari wilayah Kota Tangerang Selatan, yang dipilih dengan cermat melalui teknik pengambilan sampel yang bertujuan berdasarkan pada kriteria yang ditentukan untuk menjadi pemilih pemula yang siap untuk transisi ke pendidikan tinggi, yang berpuncak pada ukuran sampel total 150 responden.

Untuk mengumpulkan data terkait untuk analisis, kuesioner yang dibuat dengan cermat digunakan, disusun di sekitar skala Likert lima poin yang berusaha mengukur dua variabel utama: persepsi korupsi yang dipegang oleh pejabat publik, yang diperlakukan sebagai variabel independen, dan motivasi untuk terlibat dalam kegiatan politik, yang ditetapkan sebagai variabel dependen. Sebelum penerapan instrumen, pengujian ketat untuk validitas dan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan korelasi *Momen Produk Pearson* dan koefisien *Alpha Cronbach*, sehingga memastikan kesesuaian dan keandalan instrumen dalam mengukur konstruksi yang dimaksud. Data yang dikumpulkan dari responden kemudian menjadi sasaran analisis menyeluruh menggunakan uji regresi linier sederhana, difasilitasi oleh perangkat lunak statistik canggih JASP, untuk mengevaluasi secara statistik hipotesis penelitian dan memastikan validitasnya dalam konteks temuan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 150 responden. Instrumen penelitian terdiri atas variabel Persepsi Korupsi Pejabat Publik (X) dan Motivasi Peserta Didik Menjadi Aktor Politik (Y). Pengambilan data dilakukan selama satu bulan pada bulan Mei 2026 Lokasi penelitian yaitu di Tangerang selatan.

Hasil Analisis Data

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.

Variabel	N	Mean	SD
Persepsi Korupsi Pejabat Publik	150	30,74	6,72
Motivasi Menjadi Aktor Politik	150	28,43	5,97

Sumber: Hasil Olah Data JASP, 2026.

Berdasarkan hasil analisis rata-rata skor persepsi korupsi pejabat publik sebesar 30,74, sedangkan rata-rata skor motivasi menjadi aktor politik sebesar 28,43.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Tabel 2. Model Summary.

R	R ²	Adjusted R ²
0,445	0,198	0,185

Sumber: Hasil Olah Data JASP, 2026.

Nilai R² sebesar 0,198 menunjukkan bahwa Persepsi Korupsi Pejabat Publik menjelaskan 19,8% variasi Motivasi Menjadi Aktor Politik. sedangkan 80,2% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian seperti pendidikan politik, lingkungan keluarga, pengalaman organisasi, media sosial, dan kepercayaan terhadap institusi politik.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana.

Variabel	Koefisien (B)	t	Sig.
Konstanta	16,266	4,993	0,000
Persepsi Korupsi Pejabat Publik	0,396	3,819	0,000

Sumber: Hasil Olah Data JASP, 2026.

Persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = 16,266 + 0,396X$. Nilai signifikansi 0,000 < 0,05 menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan.

Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis utama (H1), yang menduga persepsi korupsi pejabat publik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap motivasi peserta didik menjadi aktor politik, ditolak. Sebaliknya, hipotesis alternatif (H2) yang mempertimbangkan kemungkinan bahwa persepsi korupsi justru memicu motivasi reaktif untuk masuk ke dunia politik demi membawa perubahan, didukung oleh data. Temuan ini mengindikasikan bahwa persepsi korupsi tidak serta-merta menumbuhkan sikap apatis atau penolakan generasi muda terhadap dunia politik, melainkan dapat berfungsi sebagai pemicu motivasi reaktif untuk masuk ke dalam sistem politik. Hasil ini sejalan dengan temuan Vela-Miranda et al. (2024) yang mengungkap adanya dualisme respons generasi muda terhadap korupsi: di satu sisi memunculkan penolakan terhadap politik, namun di sisi lain mendorong keinginan untuk masuk ke dalam sistem dan melakukan perubahan dari dalam. Hal ini

menjelaskan bahwa peserta didik, khususnya yang masih berada di jenjang SMA, memaknai fenomena korupsi pada pejabat publik bukan sebagai alasan untuk menjauh dari politik, melainkan sebagai dorongan untuk turut serta memperbaiki sistem dan menjalankan peran kepejabatannya sebagaimana mestinya, yaitu sebagai pelindung kepentingan masyarakat. Temuan penelitian ini dapat dijelaskan melalui *Self-Determination Theory* yang dikemukakan oleh Deci dan Ryan. Teori tersebut menjelaskan bahwa individu terdorong untuk bertindak ketika memiliki kebutuhan untuk berkontribusi terhadap lingkungan sosialnya. Dalam konteks penelitian ini, tingginya persepsi korupsi dapat memunculkan dorongan intrinsik pada peserta didik untuk terlibat dalam politik sebagai upaya memperbaiki kondisi yang dianggap bermasalah.

Implikasi temuan penelitian ini memiliki bobot yang cukup besar mengenai perumusan dan implementasi program pendidikan yang bertujuan memerangi korupsi, yang penting dalam membentuk kerangka etika para pemimpin masa depan. Menariknya, paparan generasi muda terhadap praktik korupsi tidak secara inheren mengarah pada penurunan keterlibatan politik mereka; melainkan, pada kenyataannya, itu dapat berfungsi sebagai dorongan kuat yang meningkatkan kesadaran politik mereka dan mendorong pendekatan yang lebih proaktif terhadap keterlibatan mereka dalam domain publik. Akibatnya, implikasi praktis yang berasal dari pemahaman ini menunjukkan bahwa inisiatif pendidikan antikorupsi harus dibuat dengan cermat tidak hanya sebagai tindakan pencegahan terhadap perilaku tidak etis, tetapi juga sebagai strategi yang efektif untuk meningkatkan motivasi intrinsik peserta didik, sehingga melengkapi mereka untuk muncul sebagai agen transformatif dalam lanskap politik saat ini, semua sambil menumbuhkan kesadaran mendalam tentang pentingnya partisipasi aktif, perhatian komunal, dan rasa akuntabilitas kolektif untuk kebaikan yang lebih besar masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa persepsi korupsi di kalangan pejabat publik memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi siswa SMA di Kota Tangerang Selatan untuk terlibat sebagai aktor politik. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran akan praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik berpengaruh dengan peningkatan motivasi untuk berpartisipasi dalam arena politik di kalangan siswa. Hasil tersebut mendukung hipotesis alternatif, menunjukkan bahwa kesadaran akan korupsi yang meluas tidak mau mengakibatkan pelepasan politik; sebaliknya, hal itu dapat mendorong individu yang lebih muda untuk menjadi aktif dalam politik sebagai sarana untuk memperbaiki sistem dan mencapai pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan integratif.

Berdasarkan hasil penelitian, lembaga pendidikan harus meningkatkan kurikulum yang berkaitan dengan pendidikan antikorupsi dan politik yang secara efektif menumbuhkan kesadaran kritis siswa, integritas, dan keterlibatan dalam proses politik. Selain itu, sangat penting untuk menerapkan berbagai inisiatif yang merangsang partisipasi siswa dalam upaya demokrasi dan kepemimpinan, sehingga memastikan bahwa motivasi politik yang baru lahir berorientasi secara konstruktif. Selain itu, peneliti didorong untuk menyelidiki variabel alternatif yang dapat mempengaruhi motivasi pelajar untuk terlibat sebagai peserta politik, termasuk kemandirian politik, kepercayaan pada entitas pemerintah, pengaruh keluarga, dan dampak media sosial, sehingga mencapai pemahaman yang lebih lengkap tentang perkembangan motivasi politik di antara populasi yang lebih muda.

DAFTAR REFERENSI

- Alfaruqy, M. Z., Emeralda, T. V., & Dewi, A. C. (2022). Keluarga sebagai mikrosistem sosialisasi politik: Survei psikologi politik. *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi)*, 13(1), 73–87. <https://doi.org/10.24036/rapun.v13i1.114885>
- Damijan, L. (2023). *Corruption exposure and youth political disengagement: Media effects in the digital age*. *Frontiers in Political Science*, 2025.
- Ekasari, F. J., Sukmana, O., Kristiano, R., & Susilo, R. K. D. (2024). Sikap apatis generasi muda terhadap *money politic*. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3), 8451–8457.
- Gani, M. H., Daud, M., & Ridfah, A. (2022). Efektivitas modul pendidikan politik terhadap efikasi politik dan partisipasi politik pada siswa SMA di Kabupaten Barru. *METAPSIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Psikologi*, 1(1), 40–50.
- Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 241–255.
- Indonesia Corruption Watch. (2025). *Laporan hasil pemantauan tren penindakan korupsi tahun 2024*. <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-2024>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Kinerja KPK 2020–2024*. <https://www.kpk.go.id>
- Mizrahi, S., & Natan Krup, D. (2025). Institutional trust, corruption, and democracy: Relationships based on people's perceptions worldwide. *Political Studies*. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/00323217251318788>
- Muhtarom, H., Pratama, C. A., & Erlangga, G. (2022). Akar budaya korupsi Indonesia: Historiografi, penyebab, dan pencegahannya. *Historiography: Journal of Indonesian History and Education*, 2(1), 13–20.
- Pradita, R. D., Priageng, S. P., Sartika, R. D., & Fatkhuri, F. (2024). Korupsi penghambat demokrasi: Menyoroti krisis transparansi pemerintah dalam korupsi Bansos Juliari Batubara. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(7), 91–100.

- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>
- Tanuja, N. R., & Winduwati, S. (2024). Pengaruh politik identitas dan penggunaan media sosial terhadap perilaku politik generasi muda. *Social and Interdisciplinary Studies in Humanities*, 3(1).
- Transparency International. (2024). *The impacts of corruption on young people and their role in preventing corruption*. U4 Helpdesk Answer 2024:36. https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/kproducts/The-impacts-of-corruption-on-young-people-and-their-role-in-preventing-corruption-U4-Helpdesk_FinalDraft.pdf
- Transparency International Indonesia. (2025). *Corruption Perceptions Index 2024*. <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2025/02/presentasi-CPI-2024.pdf>
- Vela-Miranda, O., et al. (2024). Politics, institutional corruption, and their impact on sustainable development: Perspectives from university students in Peru. *Journal of Public Affairs*. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pa.2933>